1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kondisi infrastruktur yang menyebabkan biaya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting relatif tinggi. Sebagian besar kebutuhan masyarakat masih dipasok dari luar daerah sehingga perubahan biaya transportasi, kondisi jalur distribusi, cuaca, serta ketersediaan moda angkutan dapat memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki pengukuran inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara mandiri. Oleh karena itu, perkembangan tekanan inflasi daerah dipantau melalui **perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting), kondisi pasokan, serta kelancaran distribusi**.

Selama Triwulan II Tahun 2026, pemantauan menunjukkan bahwa beberapa komoditas pangan strategis masih berada pada tingkat harga yang relatif tinggi dan mengalami fluktuasi. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain **beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula, dan komoditas pangan lainnya**.

Kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh harga komoditas di daerah asal, tetapi juga oleh panjangnya rantai pasok dan tingginya biaya transportasi menuju Mahakam Ulu. Kondisi tersebut menyebabkan harga di Mahakam Ulu relatif sulit mengikuti penurunan harga di daerah asal secara cepat.

Perkembangan beberapa komoditas strategis

Komoditas	Perkembangan Triwulan II	Kondisi/Risiko
Beras	Mengalami kenaikan pada periode tertentu	Risiko tinggi karena merupakan kebutuhan pokok utama
Cabai	Mengalami fluktuasi	Dipengaruhi pasokan dari luar daerah
Bawang merah	Relatif tinggi dan berfluktuasi	Dipengaruhi pasokan dan biaya distribusi
Bawang putih	Relatif tinggi	Risiko kenaikan apabila distribusi terganggu
Minyak goreng	Mengalami pergerakan harga	Dipengaruhi pasokan dan biaya distribusi
Gula	Relatif tinggi	Perlu pengamanan pasokan
LPG	Memiliki disparitas harga antarwilayah	Dipengaruhi distribusi dan biaya angkutan

Risiko yang perlu diantisipasi

Risiko pengendalian inflasi pada periode berikutnya terutama berasal dari:

1. **Gangguan jalur distribusi**, khususnya akibat kondisi Sungai Mahakam dan cuaca;
2. **Kenaikan biaya transportasi**, yang secara langsung meningkatkan harga barang;
3. **Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah**;
4. **Keterbatasan produksi pangan lokal** dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. **Disparitas harga antarwilayah**, terutama antara wilayah pusat kabupaten dan wilayah

yang lebih terpencil;
6. **Fluktuasi komoditas pangan strategis**, khususnya cabai dan bawang;
7. **Keterbatasan sarana penyimpanan dan cadangan pangan daerah**;
8. **Kenaikan harga energi dan bahan bakar**, yang dapat meningkatkan biaya distribusi secara keseluruhan.

Dengan demikian, tekanan inflasi di Mahakam Ulu lebih banyak berkaitan dengan **ketersediaan pasokan dan biaya distribusi** dibandingkan semata-mata perubahan harga komoditas di tingkat produsen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2026, permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi:

a. Tingginya biaya distribusi

Jarak Mahakam Ulu dari daerah sumber pasokan dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan biaya pengangkutan barang relatif tinggi. Biaya tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari harga jual yang dibayarkan masyarakat.

b. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah

Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Produksi masyarakat sebagian besar masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan pasar masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

c. Ketergantungan terhadap jalur sungai

Transportasi sungai masih menjadi salah satu jalur utama distribusi. Ketika debit Sungai Mahakam menurun, kapasitas angkutan dan jenis moda yang dapat digunakan menjadi terbatas.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan **pergantian moda angkutan dari kapal yang lebih besar ke kelotok atau moda yang memiliki kapasitas lebih kecil**, sehingga biaya distribusi meningkat.

d. Keterbatasan cadangan pangan daerah

Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki cadangan pangan daerah dalam bentuk stok besar yang dapat digunakan secara mandiri ketika terjadi gangguan distribusi. Kondisi ini menyebabkan pengamanan pasokan masih membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk Bulog.

e. Disparitas harga antarwilayah

Kondisi geografis menyebabkan harga komoditas di wilayah yang aksesnya lebih sulit cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih dekat dengan pusat distribusi.

f. Keterbatasan volume intervensi

Pelaksanaan GPM dan OPM memberikan manfaat bagi masyarakat, namun volume komoditas yang dapat diintervensi masih terbatas dibandingkan keseluruhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

g. Keterbatasan produksi pangan lokal

Peningkatan produksi pangan lokal masih membutuhkan penguatan dari sisi lahan, sarana produksi, budidaya, pemasaran dan distribusi hasil produksi.

h. Keterbatasan infrastruktur pendukung distribusi

Keterbatasan jaringan jalan, sarana transportasi dan konektivitas masih menjadi faktor struktural yang memengaruhi biaya distribusi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui penguatan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta koordinasi dengan instansi terkait, antara lain:

1. **Pemantauan harga dan ketersediaan Bapokting** secara berkala sebagai dasar untuk mengidentifikasi komoditas dan wilayah yang mengalami tekanan harga.
2. **Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)** sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat. Pada tanggal 9 - 10 Mei 2026, pelaksanaan GPM juga **dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia**, termasuk dukungan terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan GPM.
3. **Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)** pada tanggal 11–12 Mei 2026 di Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham, dengan komoditas berupa beras medium, beras premium, minyak goreng, gula, bawang merah, dan bawang putih.
4. **Koordinasi dengan Bank Indonesia, BULOG, dan pelaku usaha/distributor** dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta pelaksanaan kegiatan intervensi pasar.
5. **Penguatan kebijakan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang**, sebagai instrumen untuk membantu mengurangi beban biaya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting mengingat kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu.
6. **Penguatan koordinasi distribusi dan ketersediaan pangan** dengan OPD teknis, Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, serta pelaku usaha untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan kenaikan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026 secara umum telah memberikan dukungan terhadap **ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat**, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian.

1. **Pemantauan harga dan ketersediaan Bapokting** telah dilakukan secara berkala dan menjadi dasar dalam melihat perkembangan harga di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Namun, kualitas dan kelengkapan data masih perlu diperkuat agar dapat menjadi dasar intervensi yang lebih tepat sasaran.
2. **GPM dan OPM** mampu memberikan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau serta membantu menjaga pasokan pada saat terjadi tekanan harga. Namun, pelaksanaannya masih bersifat **periodik dan dengan volume terbatas**, sehingga belum dapat menjadi solusi terhadap tingginya harga secara struktural.
3. **Kerja sama dengan Bank Indonesia, BULOG, dan pelaku usaha** memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan stabilisasi pangan. Sinergi tersebut perlu terus diperkuat, terutama dalam menjamin pasokan komoditas yang menjadi penyumbang tekanan harga di Mahakam Ulu.
4. **Kebijakan SOA Barang** dinilai relevan dengan kondisi geografis Mahakam Ulu karena tingginya biaya distribusi merupakan salah satu faktor utama pembentuk harga. Kebijakan ini perlu terus disempurnakan berdasarkan kondisi riil biaya angkutan dan karakteristik jalur distribusi masing-masing wilayah.
5. **Penguatan produksi pangan lokal** telah mulai dilakukan melalui pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Namun, produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi.
6. Secara keseluruhan, kebijakan yang dilaksanakan pada Triwulan II lebih efektif sebagai **upaya jangka pendek untuk menjaga pasokan dan meredam tekanan harga**, sedangkan penyelesaian permasalahan distribusi, keterbatasan cadangan pangan, dan peningkatan produksi lokal masih memerlukan kebijakan jangka menengah dan panjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. **Memperkuat pemantauan harga, stok, dan distribusi Bapokting** secara rutin, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat harga relatif tinggi dan akses distribusi yang sulit.
2. **Menetapkan lokasi dan sasaran GPM/OPM secara lebih selektif** berdasarkan perkembangan harga, kondisi stok, tingkat kebutuhan masyarakat, serta tingkat keterisolasian wilayah, sehingga intervensi lebih tepat sasaran.
3. **Memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia, BULOG, distributor, dan pelaku usaha** untuk menjamin ketersediaan komoditas strategis serta mendukung pelaksanaan kegiatan stabilisasi pangan.
4. **Mengoptimalkan pelaksanaan SOA Barang** dengan mempertimbangkan biaya distribusi riil dan kondisi jalur angkutan, termasuk kemungkinan penyesuaian moda angkutan sesuai kondisi sungai dan akses wilayah.
5. **Memperkuat cadangan pangan daerah** melalui koordinasi dengan BULOG serta pengembangan sumber pangan lokal, sehingga Kabupaten Mahakam Ulu

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi gangguan pasokan.

6. **Meningkatkan produksi pangan lokal** melalui pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan komoditas pangan strategis, sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
7. **Meningkatkan peran BUMDes/BUMK, koperasi dan pelaku usaha lokal** dalam distribusi serta pemasaran hasil produksi pangan lokal, mengingat pelaku usaha lokal lebih memahami kondisi akses, rantai distribusi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
8. **Mendorong peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah**, khususnya jalan, jembatan, akses transportasi dan sarana pendukung distribusi, melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
9. **Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data harga**, sehingga kebijakan intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan berdasarkan kondisi lapangan yang aktual.
10. **Memperkuat koordinasi berkelanjutan** melalui OPD teknis dengan Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, serta antar-OPD dan pemerintah kampung dalam mengantisipasi gangguan pasokan, kenaikan harga, dan hambatan distribusi.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu tidak hanya berfokus pada intervensi harga dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada **penguatan sistem distribusi, peningkatan ketersediaan pangan, pengembangan produksi lokal, dan peningkatan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan**.